



Gelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Raperda Retribusi dan Pajak Daerah

Ada 17 Perda Dijadikan Satu, Tak Ingin Timbul Konflik di Masa Datang



BERBAGAI ELEMEN: Ketua Pansus Raperda Retribusi dan Pajak Daerah Oleg Yohan memimpin RDPU yang diikuti para pemangku kepentingan sejumlah paguyuban dan asosiasi di Kota Jogja.

DPRD Kota Jogja tengah membahas perubahan sejumlah peraturan daerah (perda) tentang retribusi dan pajak daerah. Pembahasan dilakukan panitia khusus (pansus) yang diketuai Oleg Yohan. Setelah mengadakan serangkaian rapat kerja (raker), pansus juga mengundang berbagai elemen.

"Kami ingin mendapatkan masukan, saran, dan pendapat dari masyarakat," ujar Oleg di depan perwakilan sejumlah pemangku kepentingan yang diundang pan-

sus dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di gedung DPRD Kota Jogja.

Saat bertemu masyarakat, Oleg yang berasal dari Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Jogja tidak sendirian. Beberapa anggota pansus ikut mendampingi. Di antaranya, Ipung Purwandari dan Yustinus Kelik Mulyono dari Fraksi PDI Perjuangan, Sri Retnowati dari Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Nurcahyo Nugroho dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Jogja =



↳ Baca *Ada...* Hal 7

Ada 17 Perda Dijadikan Satu, Tak Ingin Timbul Konflik di Masa Datang

Sambungan dari hal 1

Adapun pemangku kepentingan yang diundang dalam RDPU antara lain paguyuban pedagang pasar, paguyuban juru parkir, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI).

Dari Pemkot Jogja diwakili beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) seperti dinas perhubungan, dinas lingkungan hidup dan dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman (PUPKP).

Tentang kehadiran di RDPU, Oleg sebagai pimpinan sidang mengatakan, pansus tak bi-

sa mengundang semua elemen masyarakat. Ada berbagai keterbatasan sehingga hanya beberapa perwakilan. "Hadirin sekalian mewakili 400 ribu orang di luar sana yang belum (tidak) bisa diundang," ujar Oleg.

Karena itu, dia berharap RDPU itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Mereka adalah kepanjangan tangan dari berbagai asosiasi dan paguyuban. Lewat forum ini diharapkan aspirasi dapat tersampaikan. Hal-hal yang masih kurang dan tidak tepat masih bisa diperbaiki. Dengan begitu, kesepakatan dapat terwujud.

"Perda tidak menimbulkan konflik di masa yang akan

datang," ingat politikus yang berulang tahun saban 24 Desember ini.

Di depan peserta RDPU, wakil rakyat yang sehari-hari bertugas di Komisi B DPRD Kota Jogja ini mengakui raperda yang dibahas pansus cukup kompleks. Sebab, ada sebanyak sembilan perda retribusi dan delapan perda pajak daerah yang dibahas. Dengan demikian, ada 17 perda yang dijadikan menjadi satu perda.

Oleg menambahkan, sebagian besar perda retribusi dan pajak daerah yang ada di Kota Jogja merupakan produk hukum era 1992. Usianya lebih dari 30 tahun. "Memang sudah

waktunya diperbarui dan disesuaikan perkembangan zaman yang dinamis," katanya.

"Bicara tarif, retribusi dan pajak daerah adalah hal-hal sensitif," lanjut pemilik CV Iron Media ini.

RDPU yang berlangsung pada Rabu (14/6) berjalan lebih dari dua jam. Acara dimulai selepas pukul 15.00. Beberapa perwakilan dari asosiasi dan paguyuban memanfaatkan pertemuan dengan sangat baik. Mereka secara aktif mengajukan pertanyaan, pendapat maupun keberatan pada tema tertentu. "Kami tidak menanggapi langsung, tapi jadi masukan bagi kami," imbuh Oleg. (lan/kus/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

